



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 131 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1325
TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1325 Tahun 2025 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1053);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1038);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/000.7.6/203.1/DPKP/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Hal Perubahan Daftar Kegiatan Strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Nomor B/000.7.6/735/PUPP/2025 Tanggal 29 Desember 2025 Hal Penyampaian Penambahan Usulan Kegiatan Strategis Daerah TA. 2026 Lanjutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

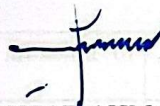
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1325 Tahun 2025 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah penambahan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 menjadi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Januari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 131 Tahun 2026

Tanggal : 7 Januari 2026

DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

I. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI		
1	Pembangunan Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		
SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA		
2	Pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional dan Museum di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang
3	Penataan Kawasan Gurindam 12 (Lanjutan)	Tanjungpinang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI		
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN		
4	Peningkatan Jalan Simpang Tugu Nanas - Simpang Urung, Kabupaten Karimun	Karimun
5	Rekonstruksi Jalan Toapaya - Tembeling, Kabupaten Bintan	Bintan
6	Peningkatan Jalan Simpang Setajam - Serteh, Kabupaten Lingga	Lingga
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN		
7	Pembangunan Jalan Sekunyam - Pian Tengah, Kabupaten Natuna	Natuna

II. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN		
SUB KEGIATAN PERBAIKAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN		
1	Rehabilitasi Pasar Barek Motor Kijang	Bintan
2	Rehabilitasi Asrama Haji Tanjungpinang (Kamar)	Tanjungpinang
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN		
3	Pembangunan Taman Kota Kijang	Bintan
4	Penataan Kolam Kota Kijang	Bintan
5	Pembangunan Taman Kota Uban	Bintan

III. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
KEGIATAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU		
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK di Tanjung Buntung, Kota Batam	Batam
2	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK di Tanjung Uncang, Kota Batam	Batam
SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK dan PERAGA PESERTA DIDIK SMK		
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMK	Provinsi Kepulauan Riau
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS		
SUB KEGIATAN RUANG KELAS BARU		
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLBN Batam	Batam

IV. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL		
1	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Pal Matak, Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Anambas
2	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna	Natuna

V. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
KEGIATAN PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN		
1	Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)	Provinsi Kepulauan Riau

VI. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI		
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP		
1	Pembayaran Iuran BFJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil	Provinsi Kepulauan Riau

VII. DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA		
1	Pembangunan Ruang <i>Biosafety Level</i> (BSL) 2 Gedung Labkesmas Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang

VIII. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH		
SUB KEGIATAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI		
1	Penyediaan Subsidi Margin 0% bagi UMKM	Provinsi Kepulauan Riau

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD